

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Perencanaan Pihak Sekolah untuk Memberdayakan Peranserta Masyarakat dalam Rangka Menghadapi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Fungsi perencanaan pihak sekolah (SD) untuk memberdayakan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi implementasi MBS dilaksanakan secara manual dan verbal. Manual menunjukkan bahwa perencanaan merupakan produk kebijakan pengembangan manajerial administrator sekolah yang bersifat penjabaran rencana makro yang mengarahkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengacu pada isu sentral pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi. Perencanaan verbal merupakan perencanaan setiap kepala sekolah yang berwujud visi untuk mencapai tujuan sekolah jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan di sekolah cenderung untuk tidak dituangkan dalam bentuk dokumen. mengingat rencana yang diatur pada pokoknya adalah rencana tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perencanaan pihak sekolah untuk memberdayakan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi implementasi MBS ditinjau dari bentuk rencana yang dibuat, dasar pertimbangan, proses penyusunan dan pihak yang

dilibatkan sangat bervariasi, artinya ada yang berorientasi pada waktu dan aktivitas. Pada waktu menunjukkan bawah perencanaan dibuat dalam bentuk program untuk setiap tiga tahun ke depan, sedangkan aktivitas berorientasi pada aktivitas pemberian pemahaman kepada orang tua siswa dan proses pembentukan Dewan Sekolah. Untuk dasar pertimbangan pembuatan rencana ada yang berdasarkan pada analisis SWOT, optimalisasi sumber daya pendidikan, inventaris kebutuhan, tuntutan perkembangan dan misi yang harus dicapai. Proses penyusunan rencana yang dilakukan sangat sederhana hanya meliputi : pertimbangan kondisi masyarakat, kebutuhan mendesak, kemampuan Dewan Sekolah, penyajian dalam bentuk program, inventarisir perangkat Dewan Sekolah, sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan rapat. Sedangkan sebenarnya proses penyusunan rencana harus sesuai dengan yang telah dikonsepsikan, sehingga pemberdayaan peran serta masyarakat dirasakan akan lebih berhasil. Untuk pihak yang dilibatkan pada dasarnya memfokuskan kepada pihak internal dan eksternal sekolah.

2. Pelaksanaan Pihak Sekolah untuk Memberdayakan Peranserta Masyarakat dalam Rangka Menghadapi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Pelaksanaan pihak sekolah untuk memberdayakan peranserta masyarakat dalam menghadapi implementasi MBS memuat pokok-pokok yang meliputi : strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, faktor yang paling menentukan dan proses koordinasi yang dilakukan. Pada dasarnya

pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat lebih dititikberatkan pada peranan Dewan Sekolah, mengingat keberadaan dewan ini memberikan keuntungan dan manfaat yang mampu menghubungkan pihak sekolah dengan lingkungannya. Sedangkan indikator lebih mengarah kepada visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. Visi melahirkan kemampuan tersendiri, menganalisis kondisi yang dihadapi saat ini secara objektif dan berbagai aspek dalam SWOT dari kondisi eksternal. Analisa yang tepat akan menghasilkan gambaran kondisi nyata yang dihadapi sekolah, dan memberikan arah pengambilan keputusan untuk mengambil langkah-langkah operasional pemberdayaan dengan tepat melalui pencapaian sasaran pada setiap komponen pendidikan. Untuk faktor yang menentukan pada dasarnya setiap SD mengacu pada aspek manajerial, keterlibatan pihak eksternal dan sumber daya manusia.

Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan lebih menitikberatkan pada proses rapat melalui Dewan Sekolah dengan unsur terkait, sehingga diperoleh kesamaan persepsi antara kebutuhan dan kepentingan pihak sekolah dengan ketersediaan masyarakat atau pihak terkait.

3. Proses Evaluasi yang Dilakukan Pihak Sekolah untuk Memberdayakan Peranserta Masyarakat dalam Rangka Menghadapi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Proses evaluasi yang dilakukan pihak sekolah untuk memberdayakan peranserta masyarakat dalam menghadapi implementasi

MBS berhubungan dengan aspek-aspek orientasi, bentuk, standar, alat dan pihak yang dilibatkan yang sangat beragam. Beragamnya orientasi atau tujuan evaluasi menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sekolah. Orientasi pada guru, masyarakat dan stakeholders menunjukkan bahwa perlunya dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan dalam arti guru perlu ditingkatkan, masyarakat perlu lebih diberdayakan dan peranan stakeholder harus lebih dkatifkan. Orientasi pada belajar siswa menunjukkan bahwa prestasi belajar yang harus lebih utama mendapat perhatian, sehingga perlu lebih ditingkatkan. Sedangkan evaluasi terhadap kebutuhan menunjukkan perlu adanya penambahan dan peningkatan kebutuhan sekolah. Bentuk yang digunakan dalam evaluasi sekaligus alatnya adalah melalui rapat, mengingat rapat inilah merupakan sarana efektif untuk meninjau keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai oleh masing-masing komponen pendidikan. Selanjutnya standar keberhasilan jelas disesuaikan dengan orientasi yang ingin dicapai. Demikian pula pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi jelas perlu semua komponen ikutserta sehingga dapat diketahui berbagai permasalahan sekaligus pemecahannya pada saat itu juga

4. Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Pihak Sekolah untuk Memberdayakan Peranserta Masyarakat dalam Rangka Menghadapi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Permasalahan yang dihadapi setiap sekolah jelas bervariasi, namun tidak menghilangkan terdapat pula aspek-aspek kesamaannya. Secara komprehensif bentuk permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan faktor internal dan eksternal. Internal berhubungan dengan peserta didik, guru, kepala sekolah sekolah dan fasilitas pendidikan, sedangkan eksternal biasanya datang dari lingkungan sekolah, baik masyarakat sekitar maupun orang tua siswa. Permasalahan utama berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan sarana pendidikan, mengingat pada saat sekarang konsepsi keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan lebih berorientasi pada penggalian sumber daya masyarakat secara material atau finansial, padahal selain aspek tersebut ada lagi aspek lainnya misalnya : sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, atau sebagai mitra usaha dalam mengelola produksi dari hasil usaha keterampilan tertentu yang telah dipelajari.

5. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pihak Sekolah Menghadapi Berbagai Permasalahan untuk Memberdayakan Peranserta Masyarakat dalam Rangka Menghadapi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Setiap upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan disesuaikan dengan jenis masalah itu sendiri yang terjadi. Namun yang lebih penting dalam mengatasi permasalahan berhubungan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi keberhasilan yang dicapai. Jika pihak sekolah

mampu mengatasi masalah secara optimal menunjukkan efektivitas dan efisiensi tinggi kinerja sekolah tersebut, namun sebaliknya jika masalah tersebut berulang kali terjadi jelas tidak efektif dan menimbulkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Oleh karena itulah fokus atau titik berat keberhasilan dalam memecahkan permasalahan, terletak pada kedinamisan organisasi dalam mengatasi masalah, artinya masalah lama dapat diatasi dan masalah baru muncul untuk kemudian dicarikan solusinya. Suatu organisasi, termasuk sekolah yang tidak mengalami masalah kurang menunjukkan organisasi tersebut dinamis, mengingat dengan adanya masalah justru dapat menimbulkan dampak yang positif bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi. Hakekat dari suatu masalah sebenarnya merupakan tantangan untuk maju dan harus dijadikan dorongan memperbaiki kinerja organisasi. Demikian pula masalah dalam pemberdayaan peranserta masyarakat dalam menghadapi MBS harus dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna bagi peningkatan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan.

Upaya mengatasi masalah di setiap SD belum bisa dikategorikan efektif atau tidak, mengingat sampai sekarang belum terukur keberhasilannya. Namun demikian jika masalah ada dan diatasi sesuai dengan jalannya tentunya dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Oleh karena itu secara keseluruhan bahwa masalah timbul biasanya selalu dicarikan solusi yang paling tepat dan efektif dari berbagai solusi yang

kepentingan dan kebutuhan organisasi atau sekolah yang bersangkutan. Keadaan demikian menuntut peran dan tanggung jawab dari kepala sekolah sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi di sekolahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tugas pokok, fungsi, kewajiban dan kedudukan seorang kepala sekolah.

B. Implikasi

Keberhasilan pemberdayaan peranserta masyarakat untuk menghadapi implementasi MBS di SD terlebih dahulu perlu dilakukan proses perencanaan dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam analisis SWOT. Tugas dan tanggung jawab tersebut sebagian besar terletak di tangan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Oleh karena itu wawasan, pengetahuan dan loyalitas kepala sekolah yang profesional memungkinkan lebih berhasil dalam memberdayakan peranserta masyarakat.

Dalam undang-undang pendidikan ditegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan di sekolah salah satunya melibatkan peranserta masyarakat. Namun dalam konteks MBS peranserta masyarakat justru yang paling menonjol dan memiliki posisi yang esensial dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, sehingga perlu diberdayakan. Peranserta masyarakat dapat berwujud pikiran, tenaga dan dana yang dihimpun menjadi satu dalam suatu wadah yang disebut Dewan Sekolah. Oleh karena itulah peranan Dewan Sekolah dalam menjembatani hubungan sekolah dengan masyarakat perlu diaktifkan dan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang peduli terhadap kepentingan pendidikan. Untuk

sementara waktu agar pemberdayaan lebih berhasil, pihak sekolah perlu melakukan pengelolaan pendidikan yang benar-benar mampu menghasilkan out put yang berkualitas, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya bersedia menjadi partner sekolah dalam memajukan pendidikan. Jika hal tersebut telah tertanam, sekolah akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam menyoerdayakan peran serta masyarakat dalam penyosong implementasi MBS. Berbagai hambatan yang melemahkan pemberdayaan peranserta masyarakat dapat dengan mudah diatasi apabila ada kesatuan persepsi antara pihak sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itulah melalui rapat Dewan Sekolah, pihak sekolah perlu menjelaskan tentang keadaan sekolah (pengembangan, kemajuan yang diperoleh, hambatan yang dihadapi, penggunaan dana dan aktivitas KBM), sehingga masyarakat dapat memahami dan bersedia untuk diberdayakan.

Dalam tahap pelaksanaan kepiawaian pihak sekolah untuk memberdayakan peranserta masyarakat dituntut untuk lebih profesional. Oleh karena itulah pemikiran-pemikiran memajukan personil sekolah yang profesional perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Personil sekolah yang profesional memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, sehingga menghasilkan output yang berkualitas dan hal tersebut yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya dalam proses evaluasi, berhasilnya peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi implementasi MBS melalui pemberdayaan peranserta masyarakat akan sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat dan aktualisasinya. Oleh karena itulah hubungan

antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pemberdayaan perenserta masyarakat untuk menghadapi implementasi MBS merupakan satu kesatuan sistem yang dapat mengakibatkan hubungan sebab akibat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dapat dirumuskan beberapa rekomendasi mengenai pemberdayaan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi implementasi MBS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, terutama SD Negeri Tambakan II, Perumnas I dan Kamarung I, sehingga hasilnya lebih optimal. Adapun rekomendasi tersebut adalah :

1. Diharapkan dapat diupayakan pada tiap sekolah kemampuan manajerial setiap kepala sekolah yang dibekali dengan pemantapan fungsi perencanaan dalam upaya terlaksananya aktivitas akses pemberdayaan, sehingga terwujud hasil evaluasi sekolah yang berkualitas. Oleh sebab itu disarankan perlu adanya upaya untuk mempersiapkan pembekalan materi kepemimpinan administrasi bagi kepala sekolah agar mampu menerapkan fungsi manajemen pemberdayaan dan merealisasikan tugas peningkatan mutu pengembangan sekolah melalui peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.
2. Disarankan untuk diupayakan pada tiap sekolah peningkatan kemampuan profesional mengajar guru melalui berbagai aktivitas yang memungkinkan dan melengkapi fasilitas pendidikan di sekolah, sehingga diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal terhadap

peserta didik dan masyarakat selaku pelanggan pendidikan menjadi terpuaskan.

3. Disarankan Memfungsikan secara optimal peranan Dewan Sekolah sebagai penghubung yang menjembatani persamaan persepsi antara pihak sekolah dengan lingkungannya, sehingga betul-betul terwujud sekolah yang mandiri.
4. Kepada pihak terkait (pemerintah setempat, perusahaan, tokoh masyarakat, orang tua murid dan masyarakat umumnya) disarankan kiranya dapat memberikan alternatif pemikiran atau tindakan nyata dalam mewujudkan terciptanya sekolah yang berkualitas.
5. Pihak sekolah hendaknya diharapkan membuat pertimbangan yang matang melalui analisis SWOT untuk memungkinkan terwujudnya pemberdayaan peranserta masyarakat yang lebih optimal dan berhasil di masa yang akan datang.
6. Kepada Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Dewan Sekolah dan Orang tua siswa didalam hal keterlibatannya pada manajemen sekolah.

